

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen.

Menurut undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sementara dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015, Mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Jangka waktu 5 tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Sementara menurut Abe (2001) Perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni : (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi; (2) bagaimana mencapai hal tersebut; (3) siapa yang akan melakukan; (4) lokasi aktivitas; (5) kapan akan dilakukan, berapa lama; dan (6) sumber daya yang dibutuhkan.

Bersesuaian dengan pendapat di atas, Tjokroamidjojo (1992) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Artinya, perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya, kemudian memilih arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Rencana dapat berupa rencana informal atau formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota organisasi. Setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepakatan tentang apa yang

harus dilakukan. Manfaat perencanaan bagi organisasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Dapat dikatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

a. Proses Penyusunan Rencana Kerja

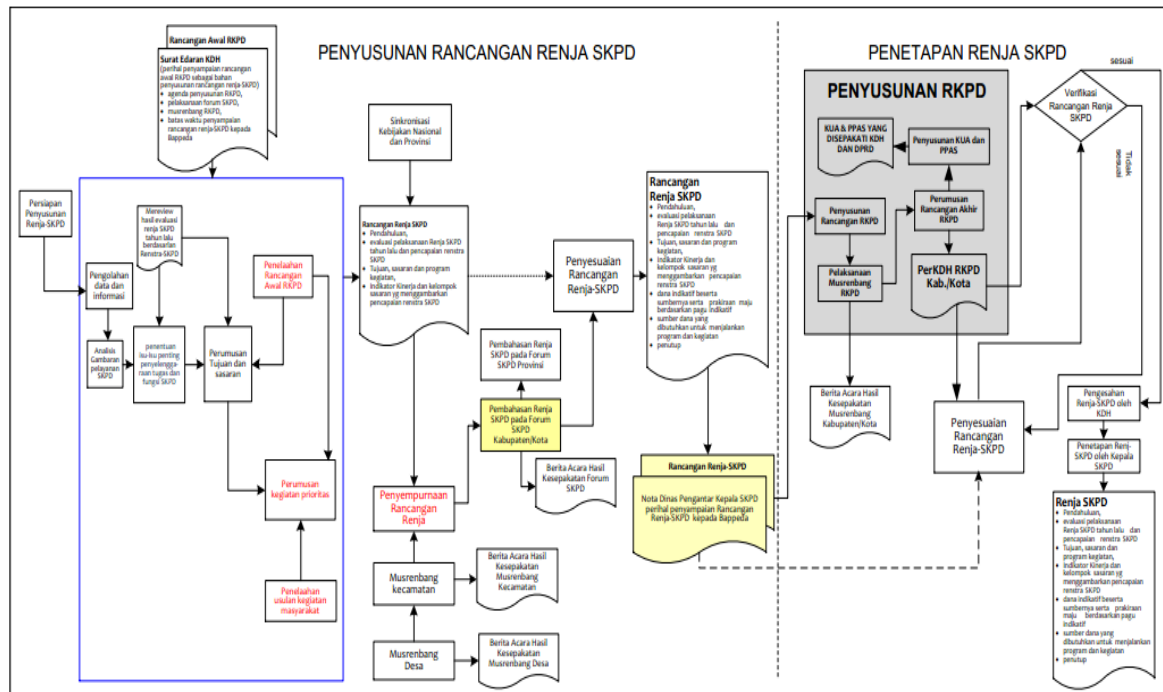
Proses penyusunan rencana kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, karena itu penyusunan rancangan Renja perangkat daerah dapat dikerjakan secara bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah pada tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya kepala SKPD menetapkannya untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berkenaan. Prinsip Penyusunan Renja SKPD :

1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja SKPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam

penyusunan RKA SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Adapun alur rancangan Renja SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 1.1. Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Tahapan-tahapan dalam persiapan penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

Dalam penyusunan Renja melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Rencana Kerja
- Penyusunan agenda kerja Tim Rencana Kerja
- Pengumpulan data dan informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur,

sistematis dan relevan bagi Pembahasan Tim dan pihak-pihak terkait dalam tahapan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

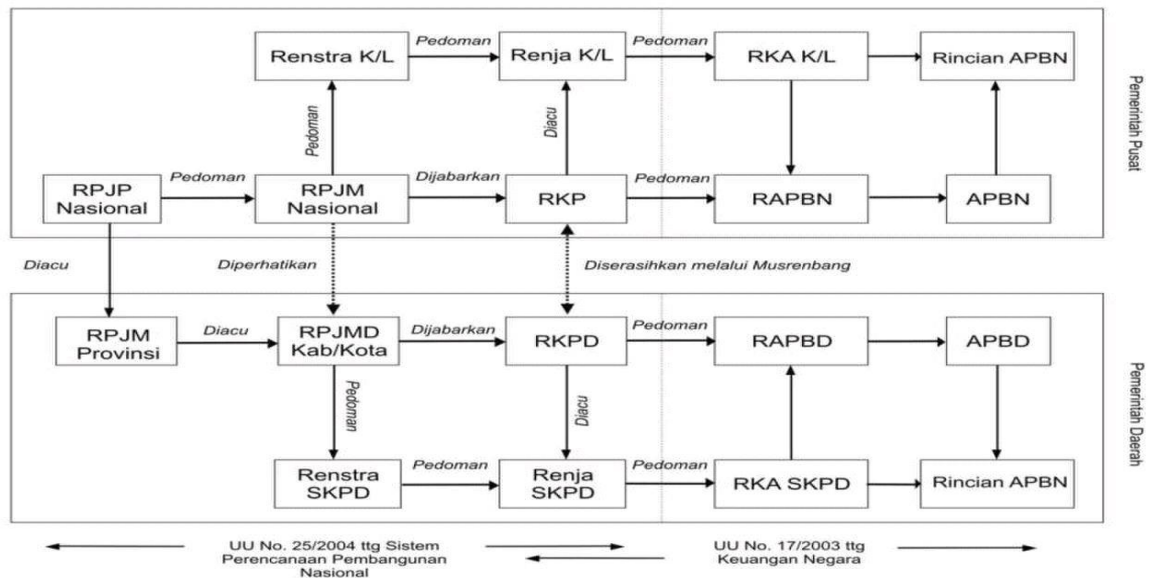
- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan SKPD
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- Perumusan kegiatan prioritas
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
- Penyempurnaan rancangan kerja SKPD
- Pembahasan forum SKPD
- Penyesuaian dokumen rancangan rencana kerja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

d. Penyajian dan penyampaian rancangan rencana kerja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan rencana kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD

f. Penetapan rencana kerja

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dapat dilihat di bawah ini :



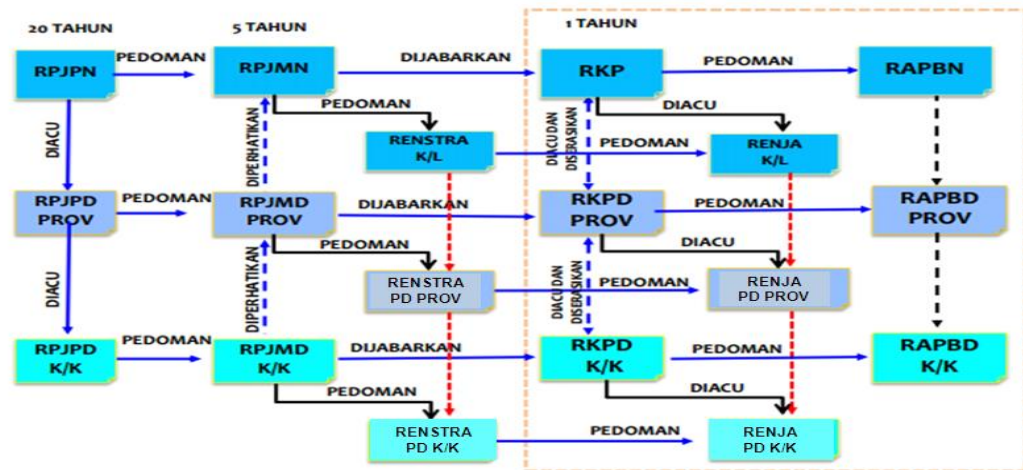
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

b. Keterkaitan antara Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam satu tahun mendatang dengan indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, khususnya pada tahun Renja terkait, dana indikatif beserta sumbernya, serta memuat prakiraan maju. Untuk saat ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah menyusun rencana kerja tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sragen.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis lima tahunan. Rencana kerja dan rencana strategis merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan, adalah sebuah proses sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen–dokumen

yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya. Mengenai keterkaitan antar dokumen perencanaan, dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1.3 Bagan Alur Hubungan Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan rencana kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 115 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
13. Keputusan Bupati Sragen Nomor 050/433/003/2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diantaranya adalah :

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pada tahun 2023 berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya dari 3 program kegiatan, 18 Kegiatan dan 48 Sub kegiatan dengan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 58.638.636.004,00 Dari total pagu indikatif tersebut realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 54.111.146.892,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92.28%.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang di rencanakan,yaitu :

Dari keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang di laksanakan oleh Sekretaris Daerah pada tahun 2023 terdapat 1 program 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang di rencanakan yaitu :

1. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
4. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
5. Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
6. Sub kegiatan pengelolaan bina mental spiritual.
7. Sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang di rencanakan.

Dari keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah pada tahun 2023 terdapat 2 program 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang di rencanakan yaitu :

- 2 (Dua) Program
 1. Program Administrasi umum.
 2. Program perekonomian dan pembangunan.

- 17 (Tujuh belas) Kegiatan
 1. Kegiatan adminitrasi kepegawaian perangkat daerah.
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 6. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 7. Kegiatan Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah.
 8. Kegiatan Penataan Organisasi.
 9. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 10. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
 11. Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum.
 12. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah
 13. Kegiatan Program Perekonomian dan Pembangunan
 14. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 15. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 16. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 17. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- 53 (Lima puluh tiga) Sub kegiatan
 1. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 2. Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan.
 3. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan kantor.
 4. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 5. Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga.
 6. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.
 7. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
 8. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 9. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 10. Sub kegiatan pengadaaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 11. Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
 12. Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
 13. Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 14. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 15. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan.
 16. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 17. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 18. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
 19. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 20. Sub kegiatan Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

21. Sub kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah.
22. Sub kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
23. Sub kegiatan Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana.
24. Sub kegiatan Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
25. Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana.
26. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.
27. Sub kegiatan Fasilitas keprotokolan.
28. Sub kegiatan Penataan administrasi pemerintah.
29. Sub kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan.
30. Sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial.
31. Sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat.
32. Sub kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum daerah.
33. Sub kegiatan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum
34. Sub kegiatan Fasilitas kerjasama dalam negeri
35. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
36. Sub kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian
37. Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
38. Sub kegiatan Fasilitas penyusunan program pembangunan
39. Sub kegiatan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan
40. Sub kegiatan Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
41. Sub kegiatan Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
42. Sub kegiatan Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
43. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang di Rencanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang di laksanakan oleh Sekretariat daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) program, 2 (dua) Kegiatan, 1(satu) sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan, yaitu :

1. Program Administrasi Umum
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
3. Kegiatan Penataan Organisasi.
4. Sub Kegiatan Sub kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan abalisis jabatan.

2.1.4 Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sebagaimana di uraikan pada sub bab 2.1.1 di atas antara lain karena :

1. Program pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran program pemerintah dan kesejahteraan rakyat adalah “Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi’ dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- a. EKPPD

Dari target nilai EKPPD yang di targetkan 33.367 tercapai 27.367 dengan tingkat capaian kinerja 81.01 %

- b. Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi.

Dari target Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi yang di targetkan 100% tercapai 91.85% dengan tingkat capaian kinerja 91.85%.

- c. Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang dimanfaatkan.

Dari target Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang dimanfaatkan yang di targetkan 100% tercapai 89.97% dengan tingkat capaian kinerja 89.97%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program pemerintah dan kesejahteraan rakyat, antara lain :

1. Perubahan pada indikator IKK sehingga ada beberapa target capaian yang menurun di penilai EKPPD.
2. Belum optimalnya produk hukum daerah yang di susun dan pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasikan dan di sosialisasikan.
3. Perubahan peraturan terkait kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang tidak di imbangi dengan peningkatan kualitas SDM di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

Sasaran kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah “terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah” dengan indikator kinerja jumlah bulan ASN yang menerima gaji dan tunjangan. Dari target kinerja 100% yang di rencanakan tercapai 88.65% dengan tingkat capai kinerja 88.65%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN di karenakan terdapat ASN yang pesiun dan mutasi pada tahun 2023.

2. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Sasaran Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah “terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN” dengan indikator kinerja jumlah bulan ASN yang menerima gaji dan tunjangan.

Dari target kinerja 100% yang di rencanakan tercapai 88.65% dengan tingkat capai kinerja 88.65%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN di karenakan terdapat ASN yang pesiun dan mutasi pada tahun 2023.

3. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Sasaran Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik adalah “terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik” dengan indikator kinerja jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dari target kinerja 100% yang di rencanakan tercapai 84.00% dengan tingkat capai kinerja 84.00%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik di karenakan pembayaran di sesuaikan dengan tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulannya.

4. Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Sasaran Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah adalah “terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah” dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah (Dokumen)”.

Dari target kinerja 100% yang di rencanakan tercapai 80.62% dengan tingkat capai kinerja 80.62%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah di karenakan kurang maksimalnya pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

5. Sub kegiatan pengelolaan bina mental spiritual.

Sasaran Sub kegiatan pengelolaan bina mental spiritual adalah “terlaksananya pengelolaan bina mental spiritual” dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan pengelolaan bina mental spiritual (Dokumen)”.

Dari target kinerja 100% yang di rencanakan tercapai 89.97% dengan tingkat capai kinerja 89.97%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan pengelolaan bina mental spiritual di karenakan kurang sesuai pelaksanaan dengan perencanaannya.

6. Sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum.

Sasaran Sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum adalah “terlaksananya fasilitasi bantuan hukum” dengan indikator kinerja jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum (kasus)”.

Dari target kinerja 100% yang di rencanakan tercapai 72.20% dengan tingkat capai kinerja 72.20%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum di karenakan jumlah kasus hukum yang memerlukan bantuan hukum yang di targetkan tidak sesuai dengan jumlah kasus hukum yang di tanganni.

Faktor – faktor pendorong terpenuhinya target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang di rencanakan oleh Sekretraiat Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2023 tersebut antara lain karena :

1. Adanya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang jelas.
2. Adanya koordinasi yang baik antara elemen di lingkungan kerja Sekretaris Daerah.
3. Adanya inovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerja Sekretaris Daerah.

Faktor – faktor pendorong melebihi target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang di rencanakan oleh Sekretraiat Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2023 tersebut antara lain karena :

1. Koordinasi dan sosialisasi yang efektif dan efisien terkait dengan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat.
2. Banyak kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Indeks pengadaan yang meningkat di tunjang dengan faktor kualitas SDM yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

2.1.5 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Dari keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang di laksanakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebagaimana yang di uraikan diatas, berdasarkan indikator kinerja masing

– masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan yang dapat berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Sekretaris Daerah Tahun 2021-2026.

Implikasi yang timbul akibat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan terhadap target capaian program Renstra tahun 2021-2026, adalah “Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi” dengan indikator kinerja EKPPD, Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi, Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang Dimanfaatkan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan tersebut di atas, kebijakan perencanaan dan penganggaran perlu di ambil guna penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penghitungan kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ASN dengan cara antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesra sehingga bisa meningkatkan capai kinerja di perangkat daerah yang dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang bantuan hukum.
3. Melaksanakan perencanaan yang baik dalam bidang kegiatan bina mental spritual masyarakat sehingga bisa tepat sasaran.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dan sampai triwulan II tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretaris Daerah dan Pecapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Sekretaris Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01	Program Administrasi umum	Persentase tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan orang yang menerima gaji dan tunjangan	70 bulan	24 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	36 bulan	40%
4.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan Bupati Wakil dan Bupati. Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70 bulan 70 bulan	70 bulan 70 bulan	14 bulan 14 bulan	14 bulan 14 bulan	100% 100%	14 bulan 14 bulan	24 bulan 24 bulan	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) Administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan (persen)	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	40%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang di sediakan	410 pakaian dinas	410 pakaian dinas	82 pakaian dinas	79 pakaian dinas	96%	82 pakaian dinas	161 pakaian dinas	40%
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Pertaturan Perundang – undangan (Sekretaris Daerah)	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan jumlah peralatan kantor yang tersedia	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%

[illegible]

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		urusan pemerintah daerah								
4.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan rumah jabatan atau dinas yang di adaka	60 bulan 250 unit	60 bulan 250 unit	12 bulan 50 unit	12 bulan 50 unit	100% 	12 bulan 50 unit	24 bulan 100 unit	40%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang (CPJP) urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pengalatan dan perlengkapan kantor.	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kantor Jumlah lokasi penyediaan jasa jaminan barang milik daerah								
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa : - Kebersihan rumah dinas dan wisma pemda. - Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS. - Keamanan kantor - Kebersihan kantor - Pengemudi - Pramusaji - Perparkiran.	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang terbayar pajaknya. Jumlah Kendaraan dinas operasional dan di pelihara. UMLAH	900 unit 280 unit	900 unit 280 unit	180 unit 36 unit	180 unit 36 unit	100%	180 unit 36 unit	360 unit 72 unit	40%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	60 bulan 60 bulan	60 bulan 60 bulan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100%	12 bulan 12 bulan	24 bulan 24 bulan	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala genset. Jumlah bulan pemeliharaan berkala perlengkapan rumah jabatan atau dinas. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala taman	60 bulan 60 bulan 60 bulan	60 bulan 60 bulan 60 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%	12 bulan 12 bulan 12 bulan	24 bulan 24 bulan 24 bulan	40%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya dana tunjangan operasional kepala daerah di tahun - n	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan Bupati Wakil dan Bupati.	70 bulan	70 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	24 bulan	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah bulan penyediaan biaya rumah tangga	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun - n	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah bulan penyediaan bouqet	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	- Indeks kelembagaan - Persentase PD dengan nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja nilai 10 - Persentase UPP dengan indeks Kepuasan Masyarakat B	44.01 35 100%	44.01 35 100%	44.01 35 100%	44.01 35 100%	44.01 35 100%	44.01 35 100%	44.01 35 100%	40%
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan kelembagaan dan abalisis jabatan	Jumlah dokumen kematangan organisasi Jumlah tersusunnya dokumen analisa beban kerja	5 dokumen 5 dokumen	5 dokumen 5 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100%	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah tersusunnya dokumen analisis jabatan Jumlah tersusunnya draf perpub tugas dan fungsi	10 dokumen 5 dokumen	10 dokumen 5 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	
4.01.01.2.13.02	Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen kegiatan survei IKM Jumlah dokumen perbup tata naskah dinas	5 dokumen 5 dokumen	5 dokumen 5 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100%	1 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	40%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen reformasi birokrasi kabupaten. Jumlah dokumen laporan monev implementasi perbup TPP	5 dokumen 5 dokumen	5 dokumen 5 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100% 100%	1 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	40%
4.01.01.2.13.03	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen monev	5 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	40%
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen LKJIP dan PK Kabupaten Jumlah dokumen draf perbub IKU	10 dokumen 5 dokumen	10 dokumen 5 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen		2 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 2 dokumen	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah bulan fasilitasi keprotokolan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	24 bulan	40%
4.01.01.2.14.01	Fasilitas keprotokolan	Jumlah bulan tugas tugas ke protokol.	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	24 bulan	40%
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	EKPPD	33.367	33.367	33.367	33.367	33.367	33.367	33.367	33.367
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintah	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen
4.01.02.2.01.01	Penataan administrasi pemerintah	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan.	5 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	7 dokumen	17.5%
4.01.01.2.01.02	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah peta rupa bumi Jumlah SPM Kabupaten	10 peta 30 SKPD	10 peta 30 SKPD	2 peta 6 SKPD	1 peta 6 SKPD	50%	2 peta 6 SKPD	4 peta 12 SKPD	30%
4.01.01.2.01.03	Fasilitas pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan otonomi daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2 kegiatan	50%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.02.01	Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah kegiatan untuk fasilitasi dan operasional hibah serta dukungan kegiatan keagamaan Jumlah lokasi hibah sarpras peribadatan	35 kegiatan 310 lokasi	35 kegiatan 310 lokasi	7 kegiatan 62 lokasi	5 kegiatan 35 lokasi	60%	7 kegiatan 62 lokasi	13 kegiatan 97 lokasi	38%
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Kegiatan hibah operasional kesejahteraan sosial	110 kegiatan	110 kegiatan	22 kegiatan	10 kegiatan	50%	22 kegiatan	34 kegiatan	30%
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah kegiatan hibah operasional kesejahteraan masyarakat	120 kegiatan	120 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	100%	24 kegiatan	48 kegiatan	40%
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase peneyenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.02.2.03.01	Fasilitas penyusunan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan rakor jarkumda dan jumlah rancangan prokumda	10 kegiatan	10 kegiatan	2 kegiatan 2 dokumen	2 kegiatan 2 dokumen	100% 100%	2 kegiatan 2 dokumen	4 kegiatan 4 dokumen	40%

[illegible]

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pembangunan yang di manfaatkan - Persentase policy brief bidang perekonomian yang di mnfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase capaian kinerja kebijakan perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Jumlah perusda yang di fasilitasi usaha daerah Jumlah perusda yang di lakukan movev	300 orang 325 orang 135 lokasi	300 orang 325 orang 135 lokasi	60 orang 65 orang 27 lokasi	60 orang 65 orang 27 lokasi	100%	60 orang 65 orang 27 lokasi	120 orang 130 orang 54 lokasi	40%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah pelaksanaan rakor equinda Jumlah peserta sosialisasi penyusunan alokasi pupuk bersubsidi	800 orang 450 orang	800 orang 450 orang	160 orang 90 orang	160 orang 90 orang	100%	160 orang 90 orang	320 orang 180 orang	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah bulan pelaksanaan monev pengendalian inflasi daerah. Jumlah peserta rakor percepatan akses keuangan daerah atau KURDA	60 bulan 975 orang	60 bulan 975 orang	60 bulan 975 orang	60 bulan 975 orang	60 bulan 975 orang	60 bulan 975 orang	60 bulan 975 orang	60 bulan 975 orang
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4.01.03.2.02.01	Fasilitas penyusunan program pembangunan	Jumlah administor yang terlatih	500 orang	500 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	40%
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah dokumen laporan monev kabupaten	20 kegiatan 20 dokumen	20 kegiatan 20 dokumen	4 kegiatan 4 dokumen	2 kegiatan 2 dokumen	50% 	4 kegiatan 4 dokumen	8 kegiatan 8 dokumen	40%
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen data pelaporan dan serapan anggaran SKPD	80 dokumen	80 dokumen	16 dokumen	12 dokumen	80%	16 dokumen	32 dokumen	40%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kemantangan UKPBJ	14 indeks	14 indeks	14 indeks	14 indeks	14 indeks	14 indeks	14 indeks	14 indeks
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang di laksanakan oleh kelompok kerja pemilihan Jumlah paket tender/seleksi yang calon penyediannya di laksanakan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi	750 paket 750 paket	750 paket 750 paket	150 paket 150 paket	98 paket 98 paket	75% 75%	150 paket 150 paket	248 paket 248 paket	33%
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah peserta Bimbinga SIRUP	900 orang	900 orang	180 orang	180 orang	100%	180 orang	360 orang	40%
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah peserta pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	750 orang	750 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	300 orang	40%

[illegible]

Dari uraian tabel di atas rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah pada tahun 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen disebutkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2023 hampir mendekati dengan target kinerja renstra tahun 2021 – 2026. Hal tersebut dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan renstra Sekretaris Daerah.

Indikator kinerja yang tercantum merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kualifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026. Tugas dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen telah menentukan tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat IKU yang dijabarkan dalam indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam dokumen Renstra Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026. Renstra Sekretaris Daerah dijabarkan dalam Renja Sekretaris Daerah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara periodik setiap tahun selama 5 tahun. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretaris daerah tahun 2023 dan tahun 2024 digambarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023
Sekretaris Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2025	Tahun n+1 2026	Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2025	Tahun n+1 2026	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			80%	85%	90%	95%	62.50%	63%	64%	65%	IKU Sekretaris daerah tahun 2021-2026
2.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi			80%	85%	90%	95%	61.76%	63%	64%	65%	
3.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi			80%	85%	90%	95%	61.76%	63%	64%	65%	
4.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi			90%	95%	100%	100%	91.67%	92%	93%	94%	
5.	Peringkat EKPPD			33.367	33.567	33.767	33.967	32.767	33.167	33.367	33.567	
6.	Presentase policy brief bidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang dimanfaatkan			100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	1	
7.	Presentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terrealisasi.			100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	
8.	Indeks tata kelola pengadaan			6	7	8	9	NA	NA	5	6	
9.	Prosentase policy brief bidang Pembangunan yang di manfaatkan			90%	90%	90%	90%	NA	90%	90%	90%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2025	Tahun n+1 2026	Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2025	Tahun n+1 2026	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Prosentase policy brief bidang Perekonomian yang di manfaatkan			100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	
11.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur selama 12 bulan			100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	
12.	Presentase tertib pengelolaan barang/Aset Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah			100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	
13.	Capaian bobot komponen pengungkit dalam reformasi Birokrasi			35	40	45	50	29.95	30	35	40	

Uraian dari tabel di atas adalah pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen adalah :

1. Indikator nomor 1 merupakan indikator kinerja tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026;
2. Indikator nomor 2 - 4 merupakan indikator kinerja sasaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026;
3. Indikator nomor 1-4 merupakan IKU Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026;
4. Indikator 5 – 13 merupakan indikator kinerja program Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah tahun 2021-2026, bahwa Sekretariat Daerah merupakan suatu wadah organisasi publik yang memiliki tujuan memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan roda organisasinya. Disamping peran dan kewenangan yang dimiliki serta berdasarkan amanah peraturan perundang – undangan, Sekretaris Daerah juga menghadapi berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal sesuai kewenangannya.

Tuntutan pelayanan publik yang prima serta keberpihakan kepada masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintah melalui isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien
2. Pengelolaan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (e government) dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaan dan pengendaliannya.
3. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN yang merupakan kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh perangkat daerah menyampaikan data pendukung indikator kinerja kunci untuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD
2. Beberapa data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan IKK

Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat
2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang sosial dan budaya

Bagian Perekonomian :

1. Pemahaman OPD dan Instansi masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak maksimal
3. Kurangnya sumber daya manusia kualitas dan kuantitas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas

Bagian Administrasi Pembangunan :

1. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi pelaporan oleh administrator di setiap SKPD di Kabuapten Sragen
2. Kegiatan pengendalian program Pembangunan tidak dapat berjalan sesuai perencanaan karena kurangnya SDM di bagian administrasi Pembangunan

Bagian Umum

1. Kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing personil. Dalam pengelolaan Administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
2. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Evaluasi kelembagaan belum berfokus kepada kinerja yang akan di hasilkan dan dilengkapi dengan proses bisnis sehingga belum menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja.
3. Evaluasi atas implementasi SOP belum di lakukan secara lengkap sehingga belum dapat mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP.
4. Perlu [perbaikan dokumen perencanaan guna penerapan manajemen kinerja serta pemberian reward dan punishment.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renja Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 di susun berpedoman pada Renstra Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Sebelum Renja di tetapkan, reviu Renja terhadap rancangan awal RKPD di lakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Renja Sekretaris Daerah Tahun 2025.

Dalam RKPD tahun 2025 apabila dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.5. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan sudah disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta pencapaian tujuan, Sekretariat Daerah menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian indikator Sekretariat Daerah pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretaris Daerah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sragen	EKPPD	33.367	16.103.259.100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sragen	EKPPD	33.367	19.817.234.509	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Sragen	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintah	5 dokumen	752.908.500	Administrasi Tata Pemerintahan	Sragen	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintah	5 dokumen	677.600.193	
4.01.02.2.01.01	Penataan administrasi pemerintah	Sragen	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan.	5 dokumen	116.799.700	Penataan administrasi pemerintah	Sragen	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan.	5 dokumen	175.450.193	
4.01.01.2.01.02	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Sragen	Jumlah peta rupa bumi Jumlah SPM Kabupaten	10 peta 30 SKPD	109.608.800	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Sragen	Jumlah peta rupa bumi Jumlah SPM Kabupaten	10 peta 30 SKPD	0	
4.01.01.2.01.03	Fasilitas pelaksanaan otonomi daerah	Sragen	Jumlah kegiatan pelaksanaan otonomi daerah	5 kegiatan	526.500.000	Fasilitas pelaksanaan otonomi daerah	Sragen	Jumlah kegiatan pelaksanaan otonomi daerah	5 kegiatan	502.150.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sragen	Persentase capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	15.030.173.550	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sragen	Persentase capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	18.837.134.316	
4.01.01.2.02.01	Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	Sragen	Jumlah kegiatan untuk fasilitasi dan operasional hibah serta dukungan kegiatan keagamaan Jumlah lokasi hibah sarpras peribadatan	35 kegiatan 310 lokasi	5.993.999.750	Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	Sragen	Jumlah kegiatan untuk fasilitasi dan operasional hibah serta dukungan kegiatan keagamaan Jumlah lokasi hibah sarpras peribadatan	35 kegiatan 310 lokasi	7.720.259.316	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Sragen	Jumlah Kegiatan hibah operasional kesejahteraan sosial	110 kegiatan	4.814.831.000	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Sragen	Jumlah Kegiatan hibah operasional kesejahteraan sosial	110 kegiatan	6.235.735.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Sragen	Jumlah kegiatan hibah operasional kesejahteraan masyarakat	120 kegiatan	4.221.342.800	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Sragen	Jumlah kegiatan hibah operasional kesejahteraan masyarakat	120 kegiatan	4.881.140.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sragen	Peresentase kerjasama yang terealisasi	100%	190.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sragen	Peresentase kerjasama yang terealisasi	100%	181.500.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.02.2.03.01	Fasilitas penyusunan produk hukum daerah	Sragen	Jumlah kegiatan rakor jarkumda dan jumlah rancangan prokumda Jumlah nota dinas/review terhadap produk hukum daerah/kebijakan	10 kegiatan 10 dokumen	70.500.000	Fasilitas penyusunan produk hukum daerah	Sragen	Jumlah kegiatan rakor jarkumda dan jumlah rancangan prokumda Jumlah nota dinas/review terhadap produk hukum daerah/kebijakan	10 kegiatan 10 dokumen	66.000.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitas bantuan hukum	Sragen	Jumlah kegiatan rakor ranham dan penanganan perkara	20 kegiatan	33.500.000	Fasilitas bantuan hukum	Sragen	Jumlah kegiatan rakor ranham dan penanganan perkara	20 kegiatan	33.000.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Sragen	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah buku/himpunan produk hukum	10 kegiatan 1650 buku	86.000.000	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Sragen	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah buku/himpunan produk hukum	10 kegiatan 1650 buku	82.500.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sragen	Peresentase kerjasama yang terealisasi	100%	130.177.050	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sragen	Peresentase kerjasama yang terealisasi	100%	121.000.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitas kerjasama dalam negeri	Sragen	Jumlah kegiatan kerjasama dalam negeri Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri	25 kegiatan 5 dokumen	130.177.050	Fasilitas kerjasama dalam negeri	Sragen	Jumlah kegiatan kerjasama dalam negeri Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri	25 kegiatan 5 dokumen	121.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sragen	Indeks tata kelola pengadaan Persentase policy brief bidang pembangunan yang di manfaatkan Persentase policy brief bidang perekonomian yang di manfaatkan	9 indeks 95% 100%	3.786.271.750	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sragen	Indeks tata kelola pengadaan Persentase policy brief bidang pembangunan yang di manfaatkan Persentase policy brief bidang perekonomian yang di manfaatkan	9 indeks 95% 100%	1.017.804.805	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sragen	Persentase capaian kinerja kebijakan perekonomian	100%	2.665.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sragen	Persentase capaian kinerja kebijakan perekonomian	100%	181.500.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Sragen	Jumlah kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Jumlah perusda yang di fasilitasi usaha daerah Jumlah perusda yang di lakukan monev	300 orang 325 orang 135 lokasi	70.000.000	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Sragen	Jumlah kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Jumlah perusda yang di fasilitasi usaha daerah Jumlah perusda yang di lakukan monev	300 orang 325 orang 135 lokasi	77.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Sragen	Jumlah pelaksanaan rakor equinda Jumlah peserta sosialisasi penyusunan alokasi pupuk bersubsidi	800 orang 450 orang	35.000.000	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Sragen	Jumlah pelaksanaan rakor equinda Jumlah peserta sosialisasi penyusunan alokasi pupuk bersubsidi	800 orang 450 orang	38.500.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sragen			2.560.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sragen			66.000.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sragen	Presentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	152.382.200	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sragen	Presentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	152.382.200	
4.01.03.2.02.01	Fasilitas penyusunan program pembangunan	Sragen	Jumlah administor yang terlatih	500 orang	52.382.250	Fasilitas penyusunan program pembangunan	Sragen	Jumlah administor yang terlatih	500 orang	57.625.475	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Sragen	Jumlah Kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah dokumen laporan monev kabupaten	20 kegiatan 20 dokumen	74.999.950	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Sragen	Jumlah Kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah dokumen laporan monev kabupaten	20 kegiatan 20 dokumen	82.500.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Sragen	Jumlah dokumen data pelaporan dan serapan anggaran SKPD	80 dokumen	25.000.000	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Sragen	Jumlah dokumen data pelaporan dan serapan anggaran SKPD	80 dokumen	30.000.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sragen	Tingkat kemantangan UKPBJ	9 indeks	568.889.550	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	per	Tingkat kemantangan UKPBJ	9 indeks	665.779.330	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Sragen	Jumlah paket pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang di laksanakan oleh kelompok kerja pemilihan Jumlah paket tender/seleksi yang calon penyediannya di laksanakan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi	150 paket 150 paket	372.961.350	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Sragen	Jumlah paket pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang di laksanakan oleh kelompok kerja pemilihan Jumlah paket tender/seleksi yang calon penyediannya di laksanakan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi	150 paket 150 paket	410.257.485	

	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Sragen	Jumlah peserta Bimbinga SIRUP	100 orang	99.999.500	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Sragen	Jumlah peserta Bimbinga SIRUP	100 orang	150.000.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Sragen	Jumlah peserta pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	100 orang	95.928.700	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Sragen	Jumlah peserta pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	100 orang	105.521.845	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sragen	Persentase pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam.	100%	400.000.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sragen	Persentase pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100%	400.000.000	
4.01.03.2.04	Koordinasi, Sikronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sragen	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	100 orang	400.000.000	Koordinasi, Sikronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sragen	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	100 orang	400.000.000	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sragen	Capaian bobot komponen pengungkit dalam reformasi birokrasi	50 Nilai	34.491.499.633	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sragen	Capaian bobot komponen pengungkit dalam reformasi birokrasi	50 Nilai	39.752.909.785	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sragen	Persentase pemenuhan tersedianya gaji dan tunjangan	100%	20.166.702.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sragen	Persentase pemenuhan tersedianya gaji dan tunjangan	100%	24.261.974.119	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
			kepala daerah dan wakil kepla daerah					kepala daerah dan wakil kepla daerah			
4.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Sragen	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan Bupati Wakil dan Bupati. Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70 bulan 70 bulan	20.166.702.900	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Sragen	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan Bupati Wakil dan Bupati. Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70 bulan 70 bulan	24.261.974.119	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya atribut kepegawaian KDH	100%	140.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya atribut kepegawaian KDH	100%	425.900.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Sragen	Jumlah pakaian Dinas yang di sediakan	410 pakaian dinas	90.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Sragen	Jumlah pakaian Dinas yang di sediakan	410 pakaian dinas	350.900.000	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Pertaturan Perundang – undangan (Sekretaris Daerah)	Sragen	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	50.000.000	Sosialisasi Pertaturan Perundang – undangan (Sekretaris Daerah)	Sragen	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	75.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan	100%	4.168.639.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan	100%	4.514.642.238	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
			perlengkapan kantor sekretariat daerah tahun -n					perlengkapan kantor sekretariat daerah tahun -n			
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan	60 bulan	29.999.000	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan	60 bulan	33.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan jumlah peralatan kantor yang tersedia	60 bulan	398.965.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan jumlah peralatan kantor yang tersedia	60 bulan	337.916.156	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sragen	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	60 bulan	75.947.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sragen	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	60 bulan	83.726.082	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat dan kegiatan rutin di luar jam kerja	60 bulan	2.600.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat dan kegiatan rutin di luar jam kerja	60 bulan	2.860.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Sragen	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	296.651.000	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Sragen	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	330.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sragen	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	60 bulan	99.996.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sragen	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	60 bulan	100.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sragen	Jumlah bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	60 bulan	700.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sragen	Jumlah bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	60 bulan	770.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor sekretaris daerah tahun - n	100%	192.306.000	Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor sekretaris daerah tahun - n	100%	211.750.000	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan rumah jabatan atau dinas yang di adakan	60 bulan 250 unit	192.306.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan rumah jabatan atau dinas yang di adakan	60 bulan 250 unit	211.750.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya jasa penunjang sekretaris daerah tahun -n	100%	4.542.084.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sragen	Persentase terpenuhinya jasa penunjang sekretaris daerah tahun -n	100%	4.963.453.880	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Sragen	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	60 bulan	58.674.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Sragen	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	60 bulan	64.541.400	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sragen	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	1.508.430.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sragen	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	1.659.273.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan jasa pengalatan dan perlengkapan kantor. Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kantor Jumlah lokasi penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	60 bulan	300.652.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sragen	Jumlah bulan penyediaan jasa pengalatan dan perlengkapan kantor. Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kantor Jumlah lokasi penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	60 bulan	330.871.415	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sragen	Jumlah bulan Penyedian Jasa : - Kebersihan rumah dinas dan wisma pemda. - Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS. - Keamanan kantor - Kebersihan kantor - Pengemudi - Pramusaji - Perparkiran.	60 bulan	2.674.328.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sragen	Jumlah bulan Penyedian Jasa : - Kebersihan rumah dinas dan wisma pemda. - Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS. - Keamanan kantor - Kebersihan kantor - Pengemudi - Pramusaji - Perparkiran.	60 bulan	2.908.768.065	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sragen	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang sekretaris daerah di tahun - n	100%	2.257.354.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sragen	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang sekretaris daerah di tahun - n	100%	1.928.934.700	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Sragen	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang terbayar pajaknya. Jumlah Kendaraan dinas	900 unit 280 unit	1.447.460.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Sragen	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang terbayar pajaknya. Jumlah Kendaraan dinas	900 unit 280 unit	1.631.934.700	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
			operasional dan di pelihara.					operasional dan di pelihara. UMLAH			
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	60 bulan 60 bulan	600.000.000	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	60 bulan 60 bulan	66.000.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	60 bulan	80.000.000	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	60 bulan	88.000.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala genset. Jumlah bulan pemeliharaan berkala perlengkapan rumah jabatan atau dinas. Jumlah bulan pemeliharaan	60 bulan 60 bulan 60 bulan	129.894.000	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sragen	Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala genset. Jumlah bulan pemeliharaan berkala perlengkapan rumah jabatan atau dinas. Jumlah bulan pemeliharaan	60 bulan 60 bulan 60 bulan	143.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
			rutin berkala taman					rutin berkala taman			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sragen	Presentase terpenuhinya dana penumpang operasional	100%	2.100.069.506	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sragen	Presentase terpenuhinya dana penumpang operasional	100%	2.242.153.477	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sragen	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan Bupati Wakil dan Bupati.	70 bulan	780.069.506	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sragen	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan Bupati Wakil dan Bupati.	70 bulan	790.153.477	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Sragen	Jumlah bulan penyediaan biaya rumah tangga	60 bulan	1.320.000.000	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Sragen	Jumlah bulan penyediaan biaya rumah tangga	60 bulan	1.452.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Sragen	Presentase penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah pada tahun -n	100%	110.432.000	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Sragen	Presentase penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah pada tahun -n	100%	121.692.120	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Sragen	Jumlah bulan penyediaan bouqet	60 bulan	110.432.000	Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Sragen	Jumlah bulan penyediaan bouqet	60 bulan	121.692.120	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Sragen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	50%	595.556.650	Penataan Organisasi	Sragen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	50%	1.028.499.395	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan kelembagaan dan abalisis jabatan	Sragen	Jumlah dokumen kematangan organisasi Jumlah tersusunnya dokumen analisa beban kerja Jumlah tersusunnya dokumen analisis jabatan Jumlah tersusunnya draf perpub tugas dan fungsi	5 dokumen 5 dokumen 10 dokumen 5 dokumen	300.000.000	Pengelolaan kelembagaan dan abalisis jabatan	Sragen	Jumlah dokumen kematangan organisasi Jumlah tersusunnya dokumen analisa beban kerja Jumlah tersusunnya dokumen analisis jabatan Jumlah tersusunnya draf perpub tugas dan fungsi	5 dokumen 5 dokumen 10 dokumen 5 dokumen	459.800.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Sragen	Jumlah dokumen kegiatan survei IKM Jumlah dokumen perbup tata naskah dinas	5 dokumen 5 dokumen	64.932.000	Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Sragen	Jumlah dokumen kegiatan survei IKM Jumlah dokumen perbup tata naskah dinas	5 dokumen 5 dokumen	163.349.395	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Sragen	Jumlah dokumen reformasi birokrasi kabupaten. Jumlah dokumen laporan monev	5 dokumen 5 dokumen	79.869.950	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Sragen	Jumlah dokumen reformasi birokrasi kabupaten. Jumlah dokumen laporan monev	5 dokumen 5 dokumen	113.850.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4							
			implementasi perbup TPP					implementasi perbup TPP			
4.01.01.2.13.03	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Sragen	Jumlah dokumen monev	5 dokumen	75.000.000	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Sragen	Jumlah dokumen monev	5 dokumen	110.000.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Sragen	Jumlah dokumen LKJIP dan PK Kabupaten Jumlah dokumen draf perbub IKU	10 dokumen 5 dokumen	75.754.700	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Sragen	Jumlah dokumen LKJIP dan PK Kabupaten Jumlah dokumen draf perbub IKU	10 dokumen 5 dokumen	181.500.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sragen	Jumlah bulan fasilitas keprotokolan	12 bulan	48.912.577	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sragen	Jumlah bulan fasilitas keprotokolan	12 bulan	53.909.856	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas keprotokolan	Sragen	Jumlah bulan tugas tugas ke protokol.	60 bulan	48.912.577	Fasilitas keprotokolan	Sragen	Jumlah bulan tugas tugas ke protokol.	60 bulan	53.909.856	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan mekanisme demikian, rencana kerja tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja tetapi juga mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan perencanaan, penelitian dan pengembangan sepanjang anggaran yang tersedia mampu mengakomodir dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan program dan kegiatan.

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pegoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani, sehingga usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan NIHIL.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sragen

Nama Perangkat : Sekretariat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk menyelaraskan Pembangunan nasional dengan Pembangunan daerah dan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Agenda Pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayan public.

Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ka. Bappenas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Ka. Bappenas, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

” Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berkualitas

- a. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masingmasing;
- b. Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
- c. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

2. Kredibel

Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Dalam proses penyusunan Renja Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, telah dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan pokok dan fungsi Sekretaris Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIS DAERAH

Dalam rangka menjamin keselarasan dan kesinambungan antara dokumen perencanaan, tujuan dan sasaran Renja Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah adalah :

Tujuan

Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.

Indikator tujuan

Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran

Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Sasaran

1. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi.
2. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi
3. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi.

Strategi

Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sragen untuk meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIS DAERAH

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 di susun dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis, serta sasaran penunjang yang telah di tetapkan dalam Renstra Sekretaris Daerah Tahun 2021-2026 sesuai

dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Renja Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi kepala daerah, tujuan dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 khususnya dalam pencapaian :
 - a. **Visi** “Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya dengan semangat gotong royong”.
 - b. **Misi** “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”.
 - c. **Tujuan**” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)” dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
 - d. **Sasaran**” Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi.
2. Dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yaitu Peningkatan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata.khususnya terhadap pencapaian “Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

3.3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) program, 18 (delapanbelas) kegiatan, 49 (empatpuluh sembilan) sub kegiatan.

Total kebutuhan dana dalam rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam renja Sekretaris Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 46.575.845.672,00 (Empatpuluh enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

3.3.2 Penjelasan Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan hasil reuiu Renja Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, rumusan jenis program, kegiatan dan subkegiatan sudah sesuai. Perbedaan yang di temukan adalah perbedaan target capaian dan pagu indikatif.

Perbedaan target capaian program terdiri dari besaran persentase capaian target kinerjanya sedangkan untuk perbedaan pagu indikatifnya pada tahun 2024 sebesar Rp 52.883.160.533,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan maka di perlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran kalrifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah akan melaksanakan 3 Program, 18 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Program

untuk sekretaris daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan adalah :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi dengan target 100%. Terdiri dari nilai EKPP, Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi target 100%, Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang Dimanfaatkan target 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- Kegiatan administrasi tata pemerintahan yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintah, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, sub kegiatan fasilitas pelaksanaan otonomi daerah.
- Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat terdiri dari sub kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat.
- Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum sub kegiatan fasilitas penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitas bantuan hukum sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.
- Kegiatan fasilitas kerjasama daerah sub kegiatan fasilitasi kerjasama dalam negeri.

2. Program Perekonomian Pembangunan.

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi dengan target 100%. Terdiri dari Persentase Policy Brief Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan target 90%, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Persentase Policy Brief Bidang Pembangunan Yang

Dimanfaatkan target 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang terdiri dari sub kegiatan fasilitas penyusunan program Pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program Pembangunan, sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan.
- Kegiatan pengelolaan barang dan jasa terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- Kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi dengan target 100% terdiri dari Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Aparatur selama 12 bulan target 100%, Persentase Tertib Pengelolaan Barang/Aset daerah di lingkungan Sekretaris Daerah target 100%. Capaian bobot komponen pengungkit dalam Reformasi Birokrasi target 50%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut

kelengkapannya, sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan.

- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan, sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah,

- Kegiatan fasilitasi kerumah tangga sekretaris daerah sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah
- Kegiatan penataan organisasi terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitas pelayanan publik dan tata laksana sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi sub kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.
- Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan terdiri dari sub kegiatan fasilitas keprotokolan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi, sementara kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2025, berisi program dan kegiatan, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Sekretaris Daerah tahun 2025 terdiri dari 3 Program, 18 Kegiatan dan 49 Sub kegiatan. Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025. Rencana program Kegiatan dan pendanaan indikatif tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Sekretaris Daerah

Kode							Urusan/Bidang/Uru san/Program/Kegia tan/SubKegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/Sas aran Perangkat Daerah	Loka si	Indikator Kinerja						Pagu Indikator (Rp)	Prakiran Maju (2025)	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
											Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Subkegiatan					
											Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							SEKRETARIAT DAERAH										61.192.334.016,00			
		4					UNSUR PENDUDKUNG URUSAN PEMERINTAH										61.192.334.016,00			
		4	01				SEKRETARIAT DAERAH										61.192.334.016,00			
		4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			Capaian bobot kompone n pengung kit dalam reformasi Birokrasi	45 Nilai	-	-	-	-	40.047.722.870,00				
		4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta penetapan		-	-	Presentase pemenuhan tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan ASN di Sekretariat Daerah	100%	-	-	20.732.931.850,00				

[illegible]

							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah orang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan	260 Orang	0,00			DETDA
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-			6.017.909.00,00			
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Pket	49.975..000,00			DETDA
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan			-	-	-	-	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Paket	1.085.425.000,00			DETDA

							kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah												
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	150.570.000,00			DETDA
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	3.699.995.000,00			DETDA
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta			-	-	-	-	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 Paket	262.344.000,00			DETDA

[illegible]

						4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	8 Unit	0,00			DETD
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya												
						4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit	204.485.600,00			DETD
	4	01	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-				7.286.781.020,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan			-	-	-	-	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	25.000.000,00			DETD

							kapasitas fiskal daerah												
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	4.000.000.000,00			DETD
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	233.911.000,00			DETD
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan			-	-	-	-	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 Laporan	3.027.870.020,00			DETD

							kapasitas fiskal daerah												
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-			2.779.898.000,00			DETDA
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	55 Unit	1.588.420.000,00			DETDA
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	722.000.000,00			DETDA

	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jmlah sarana dan prasaran a penduku ng gedung yang dipelihar a / direhabili tasi	2 Unit	119.425.000,00			DETTA
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-			2.363.685.400,00			
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah orang yang menerim a gaji dan tuunjang an Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah	2 Orang/ Bulan	785.863.400,00			DETTA
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah													

						3. Peningkatan Keberjalnjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian yang berkelanjutan pemantapan kualitas infrastruktur wilayah			-	-	-	-	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengka pan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Paket	1.442.822.000,00			DETDA	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangga a Sekretariat Daerah	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan Kualitas SDM dan kualutas hidup masyarakat			-	-	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Oran g/Bulan	-	-	217.950.000,00			
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah													
						1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan			-	-	-	-	Jumlah paket kebutuha n Rumah tangga Sekretari at Daerah yang disediaka n	200 Paket	217.950.000,00			DETDA	

						Kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat													
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	-	-	400.000.000,00			
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	130.000.000,00			DETDA
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi pelayanan Publik dan tata Laksana													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan			-	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	50.000.000,00			DETDA

							kapasitas fiskal daerah												
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	75.000.000,00			DETDA
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	85.000.000,000			DETDA
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan			-	-	-	-			40.082.000,00			

							kapasitas fiskal daerah												
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan Laporan	40.082.000,00			DETD
	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	-	-	425.000.000,00			
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil penataan Administrasi pemerintahan	1 Dokumen	60.000.000,00			DETD

							kapasitas fiskal daerah													
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	120.000.000,00			DETDA	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah														
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Doumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	245.000.000,00			DETDA	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	-	-	-	18.624.837.600,00			

	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	5.330.520.800,00			DETD
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependukan	1 Dokumen	5.717.971.000,00			DETD

[illegible]

[illegible]

						4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	3 Dokumen	82.000.000,00			DETDA	
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
						4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	3 Dokumen	65.000.000,00			DETDA	
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum													
						4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokum entasi	3 Dokumen	125.000.000,00			DETDA	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata			-	-	-	-	-	-	40.000.000,00			

							kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah												
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaktif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	30.000.000,00			DETDA
	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaktif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	-	-	1.792.773.546,00			
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas perwujudan			-	-	-	-	-	-	1.150.000.000,00			DETDA

						kemandirian ekonomi daerah													
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD													
						1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas perwujudan kemandirian ekonomi daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokuen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	75000000 Dokumen	75.000.000,00			DETDA	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
						1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas perwujudan kemandirian ekonomi daerah			-	-	-	-	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25000000 Laporan	25.000.000,00			DETDA	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													

						1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas perwujudan kemandirian ekonomi daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	105000000	1.050.000.000,00			DETDA	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-			199.999.446,00			DETDA
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
						4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaftif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	59.999.746,00			DETDA	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													

							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	89.999.200,00			DETD
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-			442.774.100,00			DETD
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	250.000.000,00			DETD
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
							4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kalaboratif perwujudan tata kelola			-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara	1 Dokumen	101.578.500,00			DETD

[illegible]

							1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas perwujudan kemandirian ekonomi daerah			-	-	-	-	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertanian, Pangan, kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Dokumen	0,00			DETDA	
JUMLAH																	61.192.334.016,00			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2025.

Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran - sasaran pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Sekretariat Daerah. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2025 ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapyun langkah- langkah persiapan dimulai sejak tanggal di tetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus di lakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan.

Sragen, 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH



dr.HARGIYANTO,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680309 199803 1 010